

Pemilu Gorontalo
1955-2014

Pemilu Gorontalo 1955-2014

Verrianto Madjowa

Banana &
Perludem
2015

Pemilu Gorontalo 1955 -2014

Verrianto Madjowa

Foto Sampul: Verrianto Madjowa

Cetakan pertama, Januari 2015

Desain Sampul dan Isi: Banana

Diterbitkan atas kerjasama

Banana dan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)

Banana

Jl. Cengkeh II No. 5D, Margonda Depok

Telp/faks.: 021 2400 7675

Email: bukubanana@yahoo.co.id

14 x 21 cm, 62 hlm

ISBN: 978-979-1079-47-1

KATA PENGANTAR

PEMILIHAN Umum 2014 telah terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu.

Seperti pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, publikasi formulir C1 telah menggerakkan ribuan orang sebagai relawan dadakan untuk masuk di portal KPU yang menyajikan rincian data hasil penghitungan suara tersebut. Sebagai prasyarat data yang terbuka, dokumen yang disajikan melalui portal KPU ini dengan mudah diakses. Selain itu, data ini digunakan kembali oleh siapa saja yang berminat mengembangkannya.

KPU juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu dengan melibatkan pemangku kepentingan. Apresiasi dan catatan-catatan untuk perbaikan Pemilu ke depan telah disampaikan berbagai pihak. Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan kepemiluan, KPU juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Buku *Pemilu Gorontalo 1955-2014* yang ada di hadapan pembaca ini merupakan bagian dari ikhtiar riset kepemiluan dengan mengumpulkan dan menyajikan kembali

dokumen-dokumen Pemilu yang pernah dilaksanakan setelah kemerdekaan hingga sekarang ini. Undang-undang Penyelenggara Pemilu mengamankan kewajiban KPU untuk mengelola, memelihara dan merawat dokumen Pemilu.

KPU memberi perhatian besar dalam penelitian dan pengembangan di bidang kepemiluan. Mengapa? Pengembangan ilmu kepemiluan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

Ketua KPURI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Husni Kamil Manik', written in a cursive style.

Husni Kamil Manik

KATA PENGANTAR

DEMOKRASI itu pemerintahan rakyat; pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan besar ini tidak mudah diwujudkan. Apalagi negara, tempat di mana rakyat dan pemerintah berada, sudah berkembang demikian kompleks akibat penduduk terus bertambah sedangkan wilayah tetap. Di sebuah negara kecil, atau negara kota pada zaman Yunani, rakyat terlibat langsung dalam pemerintahan. Tetapi di zaman modern, hal itu sulit terjadi. Di sinilah demokrasi perlu perwakilan, dan dalam demokrasi perwakilan, pemilihan umum atau pemilu menjadi instrumen penting.

Tidak hanya demokrasi, semua gagasan besar membutuhkan berbagai macam instrumen untuk mewujudkannya. Gagasan keadilan membutuhkan undang-undang, lembaga peradilan, prosedur penanganan perkara, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Gagasan kesejahteraan, membutuhkan standar pendidikan dan kesehatan, sekolah dan rumah sakit, prosedur mengajar dan merawat, serta guru dan petugas medis. Pekerja-pekerja keadilan dan kesejahteraan, memerlukan pengetahuan dan ketrampilan teknis untuk mewujudkan gagasan besar tadi; demikian juga dengan pekerja demokrasi.

Demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi, diperlukan profesionalitas dari orang-orang yang

terlibat di dalamnya. Jika seorang polisi dan jaksa tahu dan terampil menjebloskan penjahat ke penjara, seorang guru lihai menyemangati dan mengajari murid, seorang dokter tahu cara menyembuhkan orang sakit, maka seorang pekerja pemilu paham betul bagaimana menjaga setiap suara pemilih. Di sini setiap pekerja pemilu harus melindungi setiap suara, karena suara itulah yang akan dikonversi menjadi kursi perwakilan, di legislatif maupun eksekutif.

Menjaga keaslian setiap suara pemilih hingga menjadi kursi yang diduduki anggota legislatif atau pejabat eksekutif terpilih, bukanlah pekerjaan mudah. Pertama, para pekerja pemilu mesti memahami tugasnya dalam mewujudkan pemerintahan rakyat, sehingga bangga dan menyenangi pekerjaannya. Kedua, para pekerja pemilu harus mengerti mekanisme dan prosedur mengkonversi suara menjadi kursi, sehingga sadar bahwa setiap suara dari pemilih sangat berarti dalam menentukan kursi. Ketiga, pekerja pemilu harus terampil dalam pelaksanaan teknis, sehingga tidak gampang terjebak permainan manipulasi pemungutan dan penghitungan suara.

Tanpa rasa bangga dan menyenangi pekerjaannya untuk mewujudkan pemerintahan rakyat, pekerja pemilu hanya merasa terdampar dalam lautan angka-angka pemilu: jumlah pemilih, jumlah kursi, jumlah daerah pemilihan, jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan, jumlah suara tidak sah, jumlah suara sah, jumlah suara partai, dan jumlah suara calon terpilih. Lebih dari itu, para pekerja pemilu mudah terlibat dalam aksi utak atik angka suara agar menghasilkan calon terpilih berbeda.

Apabila hal ini sampai terjadi, maka pekerja pemilu bukan hanya tidak bekerja profesional, tetapi juga merusak bangunan demokrasi yang hendak diwujudkan bersama seluruh komponen bangsa. Meski hanya melakukan hal “sepele”, yaitu

mengubah angka-angka suara, petugas pemilu sesungguhnya telah menggagalkan pembentukan pemerintahan rakyat. Sebuah pengkhianatan besar yang tidak termaafkan.

Angka-angka suara hasil pemilu punya makna besar, sebab dibaliknya terdapat proses kerja besar dari para pekerja pemilu dan pihak lainnya. Dari angka itu terlihat dengan jelas, siapa-siapa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat untuk duduk di pemerintahan. Angka-angka itu menunjukkan sejatinya demokrasi, sebab prinsip demokrasi adalah pemerintah mendapat persetujuan yang diperintah. Tanpa persetujuan rakyat, pemerintahan tidak mungkin mewujudkan kebutuhan rakyat: hak hidup, hak bebas, dan hak sejahtera.

Buku *Pemilu Gorontalo 1955-2014* ini memang tipis, tetapi penuh arti. Isinya berupa angka-angka pemilu, yang tidak hanya menunjukkan bagaimana suara rakyat Gorontalo menghendaki orang-orang pilihannya menduduki jabatan pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana suara rakyat Gorontalo dimanipulasi sehingga menghasilkan pejabat pemerintah yang tidak otentik pada era Orde Baru.

Tidak gampang mendapatkan angka-angka hasil pemilu pada zaman yang sudah lewat, lebih-lebih angka-angka pemilu hasil intimidasi dan manipulasi. Kesungguhan penulis dalam mengumpulkan angka-angka pemilu Gorontalo, menunjukkan siapa sesungguhnya yang bersangkutan. Langkah ini patut diikuti kolega-koleganya di daerah lain.

Jakarta, Januari 2015
Ketua Perludem

Didik Supriyanto

PENGANTAR PENULIS

MENGUMPULKAN data hasil pemilihan umum mulai tahun 1955 tidak mudah. Bukan karena data ini sudah tak ada, melainkan hasil pemilihan ini tersebar di beberapa tempat yang berjauhan. Sebagai provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Utara, data Pemilu Provinsi Gorontalo tersebar di Gorontalo, Manado, Makassar dan Jakarta.

Untuk melacak hasil Pemilu saya ke Biro Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan BPS Kotamadya Gorontalo, Perpustakaan Provinsi Gorontalo dan Kotamadya Gorontalo. Dokumen ini tidak lengkap. Begitu pula ke Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara serta Bagian Informasi di Dinas Perhubungan Kotamadya Gorontalo.

Saya mengalami kesulitan mendapatkan data Pemilu 1997 dan 1999. Data Pemilu tersebut tidak tersedia di DPRD, perpustakaan maupun di Kantor Statistik. Di DPRD, Bagian Hukum, Pemerintahan, Dinas Perhubungan dan Informasi dan Kesbangpol Kota Gorontalo tak lagi bisa ditemukan dokumen Pemilu 1970-an sampai 1999. Dokumen yang ada di DPRD Kota Gorontalo hanya Pemilu 2004 dan 2009.

Data hasil Pemilu, paling tidak yang mengurai komposisi partai politik dan fraksi yang paling lengkap ada di DPRD Kabupaten Gorontalo. Masih bisa ditemukan komposisi

fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 1960-an hingga sekarang. Bahkan, DPRD dan Sekretariat (pegawai) membentuk tim untuk membuat “Memori” setiap lima tahun sekali, sejak 1980-an. Dengan demikian, komposisi keanggotaan dan produk DPRD di Kabupaten Gorontalo terekam dan terdokumentasi dengan baik.

Model yang ada di DPRD Kabupaten Gorontalo ini dapat dicontoh oleh DPRD lainnya di Provinsi Gorontalo. Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo perlu mengumpulkan arsip di DPRD Kabupaten Gorontalo. Begitu pula dengan Kantor Statistik.

Saya memperoleh data Pemilu 1971, untuk wilayah Sulawesi Utara, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dalam sebuah buku yang ada di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Data lainnya diperoleh di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Statistik Sulawesi Utara, Kantor Statistik Kabupaten dan Kota Gorontalo.

Ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah berbagi data Pemilu sehingga dapat menjadi sebuah buku. Terima kasih kepada Ketua KPU RI Bapak Husni Kamil Manik yang ditengah kesibukan memberikan kata pengantar untuk buku ini. Terima kasih untuk komisioner KPU RI Bapak Hadar Nafis Gumay, Bapak Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ibu Ida Budhiati, Bapak Arief Budiman, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Juri Ardiantoro.

Ucapan terima kasih untuk Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Mas Didik Supriyanto ditengah kesibukan meluangkan waktu memberikan kata pengantar buku ini. Terima kasih untuk Direktur Eksekutif Perludem Mbak Titi Anggraini dan teman-teman di Perludem.

Terima kasih untuk Penerbit Banana Mas Yusi Avianto Pareanom dan Mas Risdianto.

Saya berterima kasih kepada staf Ketua KPU Mas Eri Novianto, teman-teman di KPU Provinsi Gorontalo, serta KPU Kabupaten/Kota di Gorontalo. Semoga data Pemilu dalam buku tipis ini bermanfaat untuk kemajuan Demokrasi.

Gorontalo, Januari 2015

Verrianto Madjowa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
HUSNI KAMIL MANIK - KETUA KPU RI	v
Kata Pengantar	
DIDIK SUPRIYANTO - KETUA PERLUDEM	vii
PENGANTAR PENULIS	x
Bagian Satu	
SEJARAH PEMILU	1
Bagian Dua	
BELAJAR DARI TAKI NIODE	5
Bagian Tiga	
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	7
DAFTAR PUSTAKA	43
BIODATA	45

Bagian Satu

SEJARAH PEMILU

PEMILIHAN umum dan pemilihan kepala daerah sebagai penanda limit kekuasaan dan penguat kembali bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Rakyat sebagai pemilih dan pemimpin yang akan dipilih memiliki syarat yang diatur undang-undang dan regulasi turunannya, sesuai tingkatan. Landasan persyaratan dalam peraturan meringkaskan pemilih dan pemimpin.

Pemilu pertama di Indonesia tercatat dalam sejarah pada 1955. Pemilu ini direncanakan sejak Januari 1946, namun belum bisa terlaksana. Kondisi saat itu masih menghadapi gangguan dari luar, konflik internal antar kekuatan politik dan urusan konsolidasi pemerintahan yang baru.

Sebelum Pemilu 1955, telah dilakukan pemilihan anggota dewan di beberapa daerah di Indonesia. Daerah yang menyelenggarakan Pemilu lokal ini antara lain di Minahasa, Makassar dan Yogyakarta.

Negara Republik Indonesia Serikat yang mendapat pengakuan Kerajaan Belanda dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muncul desakan dan tuntutan membubarkan DPRD sementara, seperti di Minahasa dan diganti yang permanen. Pada 4 Desember 1950, DPRD Sementara Minahasa telah

menyusun peraturan pemilihan DPRD Minahasa. Pemilu di Minahasa dilaksanakan pada 14 Juni 1951.

Di Makassar, Pemilu lokal berlangsung pada 3 Februari 1952. Pemilihan langsung ini diikuti 17 kontestan dari partai politik, organisasi sosial politik dan perorangan. Hasil pemilihan tersebut, terpilih 25 anggota dewan. Inilah salah satu yang menjadi cikal bakal pelaksanaan Pemilu 1955.

Pemilu 1955 berlangsung dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, 15 Desember 1955 memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.

Enam belas tahun kemudian, di era Orde Baru, terlaksana Pemilu di seluruh Indonesia, yakni pada 1971. Pemilu ini dilaksanakan tanggal 5 Juli. Peserta Pemilu: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiah, dan Partai Nasionalis Indonesia. Selain itu, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba dan Sekber Golongan Karya (Golkar). Golkar yang mulai dirintis dan berperan sejak 1958, lahir pada 20 Oktober 1964.

Pemilu berikutnya, 1977, kontestan masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golkar. Telah terjadi peleburan atau penggabungan (fusi) partai politik. PPP merupakan penggabungan dari NU, Parmusi, Perti dan PSII. PDI gabungan PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba.

Setiap lima tahun, Pemilu bergulir di Indonesia. Hingga tercatat Pemilu di masa Orde Baru terakhir dilaksanakan pada 29 Mei 1997.

Soeharto lengser sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 dan digantikan Bacharuddin Jusuf Habibie. Pemilu yang rutin setiap lima tahun, dipercepat, yakni pada 7 Juni 1999. Di awal era reformasi, banyak muncul partai baru. Jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM sebanyak 141 partai. Yang lolos verifikasi dan sebagai peserta Pemilu 48 partai.

Pada 2014 mendatang merupakan Pemilu ke empat di era Reformasi. Dengan demikian, sejak kemerdekaan hingga sekarang, sudah sebelas kali Pemilu legislatif seluruh Indonesia. Era reformasi juga ditandai dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

ARSIP

Arsip Pemilu memiliki peran penting dalam menjembatani peristiwa di masa yang telah dilewati. Dokumentasi Pemilu ini dapat berupa formulir, keputusan hasil perolehan penghitungan suara, gambar dan lain-lain yang dikeluarkan lembaga resmi sebagai penyelenggara Pemilu.

Berkaitan dengan arsip Pemilu, hingga saat ini masih belum tertata dengan baik. Kondisi ini terjadi di daerah, seperti di Badan Arsip dan Perpustakaan, serta di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Di daerah, sulit mendapatkan arsip hasil Pemilu 1955 hingga 1999, apalagi daerah pemekaran. Untuk mendapatkan data tersebut, bisa dilacak satu persatu dalam laporan Biro Statistik atau di DPRD.

Di ANRI telah diinventarisasi hasil Pemilu 1955 hingga 1999. Arsip Pemilu 2004 dan 2009, belum tertata. Yang ada hanya data elektronik (*soft copy*), sedangkan arsip dalam bentuk fisik belum ada dalam daftar inventaris.

Padahal, sejak 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ANRI telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama berkaitan dengan penanganan arsip Pemilu. Perjanjian maupun surat edaran bersama telah dibuat hingga hasil Pemilu 2009. Bahkan, dalam peringatan Hari Kearsipan Nasional 25 Mei 2012 lalu ANRI dan KPU kembali menandatangani surat edaran bersama tentang penyelamatan arsip/dokumen Pemilu 2009.

Khusus pemilihan umum kepala daerah yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), ANRI telah mengarsipkan kasus-kasus tersebut. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah diinventarisir dari 2005 hingga 2010. Adapun hasil Pemilu kepala daerah yang tidak masuk ke MK dan tindak lanjut putusan MK belum ada di ANRI.

Dengan melihat kondisi seperti ini, dokumen yang ada di ANRI maupun di Badan Arsip di daerah tergantung penyediaan dari lembaga penyelenggara Pemilu, yakni KPU. Sudah saatnya, Badan Arsip dan Perpustakaan di daerah dan ANRI memiliki dokumen yang lengkap hasil Pemilu.

Bagian Dua

BELAJAR DARI TAKI NIODE

Taki Niode, biasa disapa Boe Taki adalah seorang sosok negarawan yang patut dijadikan teladan. Ia lahir di Parigi Sulawesi Tengah 21 April 1921 dan tercatat sebagai Walikotapradja Gorontalo kemudian menjadi walikotamadya (1963-1971).

Setelah dilantik tanggal 5 Agustus 1963 sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II, ia bertandang ke rumah Atje Slamet. Boe Taki meminta pengarahannya singkat dari walikotapradja sebelumnya. Di masa sekarang, jangankan meminta arahan, bertandang ke rumah pejabat sebelumnya, jarang terjadi.

Sebagai pejabat pemerintahan di awal era Orde Baru, Boe Taki memperlihatkan sebagai seorang kepala pemerintahan yang netral. Meski ada SK Menteri Dalam Negeri agar Golkar meraih suara minimal 51% dan wajib berkampanye untuk Golkar, ia menunjukkan loyalitasnya kepada negara, bukan kepada Golkar.

Boe Taki kemudian mengundang seluruh pimpinan partai politik dan Golkar di kediamannya. Dengan tegas ia sampaikan bahwa menghadapi Pemilu sebagai walikota akan bersikap netral. Pernyataan ini dibuktikan Boe Taki dengan tidak berkampanye untuk Golkar.

Pemilu 1971 berjalan dengan lancar dilandasi dengan kejujuran dan keadilan. Golkar tidak menang mutlak sebagaimana ditargetkan. Boe Taki kemudian mengirim surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD Tingkat II.

Keinginan kuat Boe Taki untuk mundur dijawab dengan Surat Keputusan (SK) DPRD, isinya tetap mengakui Boe Taki sebagai walikota hingga selesai masa jabatannya. SK Ketua DPRD Gorontalo ini dinilai Mendagri menyalahi tatacara dan mekanisme pengangkatan walikota.

Boe Taki tidak punya ambisi menjadi walikota Gorontalo. Ia dikenal jujur, bersih, tekun, ulet, menghargai waktu dan tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri.

Bagian Tiga

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Syarat pemilih lainnya: terdaftar sebagai pemilih, bukan anggota TNI/Polri, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, rakyat memilih pemimpin, yakni mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun di daerah, Dewan Perwakilan Daerah, memilih kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Memilih pemimpin secara langsung ini mulai dilakukan pada 2004.

Seperti disampaikan Wakil Presiden pertama RI Mohamad Hatta, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada rasa tanggung jawab. Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan. Demokrasi akan mendidik orang untuk bertanggung jawab tentang keselamatan dan kesejahteraan umum.

Tujuan demokrasi, kata bung Hatta, sebagai perluasan

akses politik kaum miskin. Pendidikan politik dilakukan agar keinsyafan rakyat akan hak dan harga dirinya bertambah kuat dan pengetahuan tentang politik, hukum dan tata kelola pemerintahan bertambah luas. Pendidikan ekonomi bagi rakyat dilakukan supaya terdapat suatu perekonomian baru bagi rakyat Indonesia. Pendidikan sosial bagi rakyat dilakukan supaya dapat mempertinggi keselamatan kehidupan rakyat.

Bung Hatta, sejak awal kemerdekaan terus mendorong pembentukan partai politik terkait persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu 1946, melalui Maklumat X tanggal 3 November. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum memberikan penghargaan *lifetime achievement* kepada bung Hatta. Presiden ke 3 RI bapak Bacharuddin Jusuf Habibie juga diberikan penghargaan oleh KPU karena jasanya memastikan percepatan penyelenggaraan Pemilu 1999 sebagai pintu memasuki era demokrasi. Penghargaan ini diberikan KPU pada Rabu 17 Desember 2014 di Hall Ecovention Ecopark Ancol.

PEMILU LOKAL

Sebelum dilaksanakan Pemilu 1955, telah dilakukan pemilihan anggota DPRD di Minahasa, Makassar dan Yogyakarta. Menurut peneliti dari Universitas Hasanuddin, Burhaman Junedding, tiga pemilu lokal ini menjadi cikal bakal dan contoh untuk pelaksanaan Pemilu 1955. Pemilu lokal di Minahasa berlangsung pada 1951.

Pemilu lokal ini dilaksanakan setahun setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terbentuk dan terlaksana atas pengakuan Kerajaan Belanda, pada 27 Desember 1949. Sebelumnya, pada 24 Desember 1946 terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT), Sulawesi Utara termasuk salah satu negara bagian.

Pada 17 Agustus 1950, Negara RIS dibubarkan, dan dinyatakan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat Gubernur Sulawesi saat itu adalah BW Lopian, yang bertugas 17 Agustus 1950 hingga 1 Juli 1951. Pada 4 Juli 1951, jabatan Gubernur Sulawesi yang permanen dipegang oleh Sudiro. Sebelumnya kabinet telah menetapkan Sudiro untuk jabatan Gubernur Sulawesi pada 28 Juni 1951.

Setelah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, muncul tuntutan pembubaran DPRD sementara untuk diganti yang permanen. Pada 4 Desember 1950, DPRD Sementara Minahasa telah menyusun peraturan pemilihan DPRD Minahasa. Pemilu lokal di Minahasa dilaksanakan pada 14 Juni 1951.

Pada 20 Oktober 1951, DPRD dan DPD Sulawesi Utara (Gorontalo masih dengan Sulawesi Utara di masa itu) dibekukan. Samadikun diangkat sebagai Kepala Daerah Sulawesi Utara. Selanjutnya DPRD dan DPD di Sulawesi Tengah dibekukan.

Pemilu lokal di Makassar berlangsung pada 3 Februari 1952. Pemilihan langsung ini diikuti 17 kontestan dari partai politik, organisasi sosial politik dan perorangan. Hasil pemilihan tersebut, terpilih 25 anggota dewan. Menurut Burhaman Junedding, Pemilu lokal di Makassar, dimenangkan Masyumi. Urutan kedua, Partai Kedaulatan Rakyat.

Menurut Barbara Sillars Harvey, Partai Kedaulatan Rakyat lahir setelah Pusat Keselamatan Rakyat dilarang pada September 1946. Sebelum menjadi Pusat Keselamatan Rakyat nama organisasi yang lahir di Makassar ini dikenal dengan Sudara (Sumber Darah Rakyat dalam bahasa Jepang *Kenkoku Doshikai*).

Organisasi Sudara lahir pada Juni 1945, dengan dorongan (dukungan) Jepang sebagai dasar kerjasama orang Minahasa di utara dan Bugis-Makassar di selatan. Sebelumnya orang Jepang

telah mendorong organisasi-oranisasi nasionalis di Pulau Jawa. Tujuan organisasi ini untuk menentang pengembalian orang Belanda. Organisasi Sudara diketuai Andi Mappanjukki, putra raja Gowa terakhir, Dr Sam Ratulangie ditunjuk sebagai wakil ketua.

Pada 1952, Kahar Muzzakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII). Jabatan Kahar Muzzakar di NII adalah panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia (TII).

PEMILU 1955

Pemilihan umum di seluruh Indonesia telah direncanakan pada Januari 1946. Namun, Pemilu ini belum terlaksana lantaran belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat Undang-Undang Pemilu. Selain itu, belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada dan masih terjadi gangguan dari luar. Para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Pemilu 1955 berlangsung dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Kedua, pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 dilaksanakan di masa Demokrasi Parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.

Di Gorontalo, yang memperoleh persentase suara terbanyak pada Pemilu 1955 adalah: Masyumi (37,35 %), PSII (35,78%), PNI (12,45%) dan NU (11,27%).

Tabel 1. Persentase suara pemilihan anggota DPR (parlemen) 1955 di Gorontalo.

Partai	Persentase
Partai Nasional Indonesia (PNI)	12,45
Masyumi	37,35
Nahdlatul Ulama (NU)	11,27
Partai Komunis Indonesia (PKI)	0,78
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	35,78
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	0,50
Partai Katolik	0,04
Partai Sosialis Indonesia (PSI)	0,15
Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)	0,23

Dimodifikasi berdasarkan Barbara Sillars Harvey (1989)

Bukan hanya di Gorontalo Masyumi memiliki persentase tertinggi. Untuk Sulawesi Utara dan Tengah Masyumi menang di Bolaang Mongondow, Donggala dan Poso. PSII meraih persentase terbanyak kedua di Sulawesi Utara dan Tengah, kemudian Parkindo dan PNI. Lumbung suara PSII berada di Donggala, Gorontalo dan Bolaang Mongondow. Parkindo menang di Sangihe Talaud, Minahasa dan Manado. Sulawesi Utara dan Tengah masuk dalam Daerah Pemilihan 11.

Di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, Daerah Pemilihan 12, Masyumi tertinggi di Kabupaten Makassar, Kota Makassar, Bonthain, Bone, Pare-pare, Mandar dan Tenggara. NU menempati persentase kedua, kemudian Parkindo dan PSII. Parkindo berada di urutan ketiga persentase terbanyak karena berhasil menang 56,49 persen di Luwu dan 15,73 persen di Mandar.

Menurut Burhaman Junedding, kemenangan Masyumi di Pulau Sulawesi (Dapil 11 dan 12) tidak lepas dari pengaruh tokoh publik di Muhammadiyah. Rakyat (pemilih) banyak kecewa dengan pemimpin lokal. Berbeda dengan di Pulau Jawa, elit politik berada di PNI dan terpilih.

Burhaman telah melakukan penelitian untuk tesisnya dengan mengambil judul: Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak. Tesis ini mempelajari Pemilu pada 1955. Khususnya di Luwu yang menjadi basis utama gerakan Kahar Muzzakar, malah dimenangkan Parkindo. Karena itu, Burhaman menolak teori patron klien yang disampaikan Christian Pelras.

Dalam buku “Manusia Bugis” Pelras mengulas beberapa halaman soal patron klien.

Menurut Pelras, dalam kehidupan masyarakat Bugis, interaksi sehari-hari, pada umumnya berdasarkan sistem patron-klien (sistem kelompok kesetiakawanan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya). Hubungan antara pemimpin dan pengikut, patron dan klien, terjalin secara sukarela dan hanya berdasarkan kontrak tak tertulis.

Khususnya di Sulawesi Selatan, pada Pemilu 1955, elit lokal tidak mendapat perhatian (tidak disukai). Terdapat keturunan raja atau bangsawan yang mencalonkan diri, tidak terpilih. Secara umum, Masyumi menang di Sulawesi Selatan, kemudian NU.

Kondisi seperti ini juga tampak di Gorontalo. Elit lokal tidak memperoleh persentase tertinggi pada Pemilu 1955. Masyumi dan PSII menempati persentase teratas.

Khusus Partai Kedaulatan Rakyat, sebagai partai lokal juga tidak mendapat perhatian pada Pemilu 1955 di Pulau Sulawesi. Dalam Pemilu 1955, PKR sebagai partai lokal hanya memperoleh suara yang sedikit.⁴

Tabel 2. Hasil, persentase dan perolehan kursi 10 partai untuk Pemilihan anggota DPR seluruh Indonesia.

Partai	Suara	Persentase	Kursi
Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
Masyumi	7.903.886	20,92	57
Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
Partai Katolik	770.740	2,04	6
Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4

Sumber: KPU RI

Keseluruhan jumlah kursi anggota DPR hasil Pemilu 1955 sebanyak 257 kursi. Untuk Dewan Konstituante jumlah kursi sebanyak 520. Karena Irian Barat (Papua) tidak melakukan pemilihan jumlah anggota Konstituante hanya 514.

Tabel 3. Sepuluh besar partai politik untuk anggota Konstituante

Partai	Suara	Persentase	Kursi
Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
Masyumi	7.789.619	20,59	112
Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16

Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
Partai Katolik	748.591	1,99	10
Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7

Sumber: KPU RI

Satu catatan penting pada Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Pejabat yang ikut dalam pemilihan, tidak menggunakan fasilitas negara dan menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Sistem pemilihan dengan banyak partai terlalu demokratis.

PERIODE 1961 – 1971

Pada periode 1961 hingga 1971, terdapat sejumlah anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo. Belum diketahui apakah jumlah anggota DPRD ini hasil pemilihan umum pada 1955, pemilu lokal, penetapan atau diangkat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada 1959 dan 1960, telah dikeluarkan dua produk hukum yang menggunakan sistem Demokrasi Terpimpin. Salah satunya Penetapan Presiden nomor 5 tahun 1960 yang mengubah susunan keanggotaan DPRD yang terdiri atas wakil partai politik sesuai hasil pemilihan umum, menjadi Dewan yang terdiri atas wakil partai politik dan golongan fungsional, dengan menetapkan kepala daerah sebagai ketua DPRD.

Periode 1961-1966, DPRDGR (Gotong Royong) dengan ketua AA Wahab yang juga Bupati Kabupaten Gorontalo.

Wakil ketua DPRDGR SPH Lipoeto. Jumlah anggota DPRDGR 20 orang, terdiri dari: PSII 9 orang, NU 4 orang, PNI 5 orang dan ABRI 2 orang. Di Kotapradja Gorontalo ketua DPRD GR Jusuf Halalutu (1960-1965).

Periode 1966-1997, ketua DPRD Kabupaten Gorontalo telah dipilih oleh anggota. Terpilih sebagai ketua SPH Lipoeto. Jumlah anggota 16 orang, terdiri dari NU 4 orang, PSII 7 orang, PNI 4 orang dan ABRI 1 orang.

Periode 1967-1969, ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Hs Mile (NU), wakil ketua AW Pembengo (PNI), wakil ketua H Hadju (PSII), wakil ketua L Mose (ABRI). Jumlah anggota sebanyak 36 orang. Terdiri dari: NU 8 orang anggota, PNI 6 orang, PSII 12 orang, Parkindo 1 orang, IPKI 1 orang, Parmusi 4 orang dan ABRI 4 orang.

DPRD Periode 1969-1971 sudah berjumlah 40 orang. Ketua S Dalie (PSII), wakil ketua L Mose (ABRI), wakil ketua AW Pembengo (PNI), wakil ketua AG Gobel (NU). Periode ini NU sebanyak 4 orang, PSII 8 orang, PNI 4 orang, Parmusi 2 orang, Parkindo 1 orang, IPKI 1 orang, organisasi profesi 16 orang dan ABRI 4 orang.

PEMILU 1971

Pemilu 1971 dilaksanakan pada 5 Juli. Peserta Pemilu ini: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiah, dan Partai Nasionalis Indonesia. Selain itu, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba dan Sekber Golongan Karya (Golkar). Golkar mulai dirintis dan berperan pada 1958 dan lahir pada 20 Oktober 1964.

Terdapat 360 kursi yang diperebutkan, dengan hasil perolehan: Golkar 236 kursi, NU 58 kursi, Parmusi 24 kursi,

PNI 20 kursi, PSII 10 kursi, Parkindo 7 kursi, Katolik 3 kursi, Perti 2 kursi. IPKI dan Murba tidak memperoleh kursi.

Total jumlah penduduk Sulawesi Utara 1.659.280, pemilih 759.651. Jumlah penduduk pada 1971 di Kabupaten Gorontalo 397.828 dengan jumlah pemilih 182.389. Di Kodya Gorontalo, jumlah penduduk 80.031, pemilih 39.204.

Tabel 4. Komposisi anggota DPRD hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Gorontalo pada 1971-1977

Komposisi Anggota	Jumlah Kursi	Keterangan
Sekretariat Bersama Golongan Karya	13	- Data yang dikeluarkan Kantor Statistik telah menggabungkan perolehan Golkar dan Non ABRI menjadi 15 kursi.
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	8	
Nahdlatul Ulama (NU)	4	
Parmusi	4	- Bila dikonversi sesuai fusi (penggabungan partai politik pada 1977) PPP memperoleh 16 kursi.
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	3	
ABRI	6	
Non ABRI	2	- Ketua DPRD: dr ZU Sidiki (Golkar), wakil ketua Soedjito (ABRI) dan SPH Lipoeto (PPP)
Jumlah	40	

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Utara (1981) dan DPRD Kabupaten Gorontalo (Memori 1987-1992)

Tabel 5. Komposisi anggota hasil Pemilihan Umum di Kodya Gorontalo pada 1971-1977

Komposisi Anggota	Jumlah Kursi
Sekretariat Bersama Golongan Karya	6
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	3
Nahdlatul Ulama (NU)	4
Parmusi	3
PNI	1
ABRI	3
Jumlah	20

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Utara (1981)

PEMILU 1977

Pada 1977, pemungutan suara dilaksanakan 2 Mei. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Berbeda dengan Pemilu 1955 dan 1971, pemilu kali ini hanya diikuti Golongan Karya (Golkar) dan dua partai politik: Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Terjadi peleburan (fusi) partai politik pada pemilu kali ini. PPP merupakan penggabungan dari NU, Parmusi, Perti dan PSII. PDI merupakan penggabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba.

Golkar meraih 232 kursi dan PPP yang merupakan gabungan partai Islam memperoleh 99 kursi. PPP banyak mendapat suara di basis Masjumi, namun di basis NU mengalami penurunan. PDI yang merupakan gabungan PNI, Parkindo dan Partai Katolik hanya memperoleh 29 kursi.

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo 456.914, pemilih 225.160. Di Kodya Gorontalo jumlah penduduk 88.430, pemilih 45.885. Total jumlah penduduk Sulawesi Utara 1.900.529, pemilih 991.509.

Untuk DPR RI, PPP memperoleh satu kursi, Golkar empat kursi dan PDI satu kursi.

Di DPRD Tingkat I Sulawesi Utara, PPP memperoleh enam kursi. Golkar 23 kursi dan PDI tiga kursi. Jumlah ini masih ditambah dengan enam kursi untuk ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan dua kursi bukan ABRI. Dengan demikian, jumlah kursi di DPRD tingkat I Sulawesi Utara sebanyak 40 kursi.

Pada 1977 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo terdapat 209.223 suara, dengan BPP 6538. Anggota sebanyak 32 orang. PPP memperoleh 80.918 suara dengan 12 kursi. Golkar memperoleh 106.918 dengan 17 kursi dan PDI memperoleh 21.438 suara dengan tiga kursi.

Untuk hasil perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Pemilu 1977 – 1982 terdapat perbedaan data di BPS Kabupaten Gorontalo, BPS Sulawesi Utara dan data di DPRD Kabupaten Gorontalo. Data di BPS Kabupaten Gorontalo diragukan.

Tabel 6. Komposisi anggota DPRD hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Gorontalo pada 1977-1982

Komposisi Anggota	BPS Sulawesi Utara	BPS Kabupaten Gorontalo	DPRD Kabupaten Gorontalo
PPP	12	2	13
Golkar	19	29	18
PDI	3	1	2
ABRI	6	6 (ditambah non ABRI 2)	7
Jumlah	40	40	40

Ketua DPRD kabupaten Gorontalo periode 1977 – 1982, Ketua NA Mooduto (Golkar), Wakil Ketua M Sangid (ABRI), Wakil Ketua Beny Latief (PPP).

DI DPRD Kotamadya Gorontalo, terdapat 42.259 suara, BPP 2.641 dengan jumlah anggota 16 orang. PPP memperoleh 21.810 dengan delapan kursi. Golkar memperoleh 18.856 dengan tujuh kursi dan PDI 1.593 dengan satu kursi.

Kemenangan PPP di Kotamadya Gorontalo dan memperoleh kursi yang signifikan di Kabupaten Gorontalo, tidak lepas dari pengaruh pengusaha nasional H Thayeb Mohammad Gobel. Di masa hidupnya, Thayeb Mohammad Gobel tetap menjunjung idealisme dan duduk dalam kepengurusan sebagai Wakil Ketua Umum PPP.

Tabel 7. Komposisi anggota DPRD hasil Pemilihan Umum di Kodya Gorontalo pada 1977-1982

Komposisi Anggota	BPS Sulawesi Utara	Almanak Golkar
PPP	8	8
Golkar	8	7
PDI	1	1
ABRI	3	
Jumlah	20	

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Utara (1981) dan Almanak Nasional Golkar (1983-1988)

PEMILU 1982

Seperti halnya Pemilu 1977, pada 1982 yang mengikuti pemungutan suara adalah PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu yang berlangsung pada 4 Mei itu memperebutkan 364 kursi. Golkar memperoleh 242 kursi, PPP 94 kursi dan PDI 24 kursi.

Jumlah penduduk Sulawesi Utara 2.135.290, pemilih 1.158.815. Sebanyak enam kursi diperebutkan untuk DPR RI. PPP memperoleh 104.343 suara dengan satu kursi. Golkar memperoleh 506.468 suara dengan lima kursi dan PDI memperoleh 21.879 suara, tanpa kursi.

Pada 1982, terdapat 32 kursi yang diperebutkan dua partai politik dan Golkar di DPRD Tingkat I Sulawesi Utara. Jumlah suara sebanyak 1.124.667, dengan BPP 35.145. PPP memperoleh 75.488 suara, dengan dua kursi. Golkar memperoleh 980.557 suara dengan 28 kursi dan PDI memperoleh 65.622 dengan dua kursi.

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo pada 1982 sebanyak 525.409, pemilih 263.387. Jumlah kursi 32 dan suara sah sebanyak 259.152. PPP memperoleh 16.994 dengan dua kursi. Golkar 237.506 dengan 29 kursi dan PDI memperoleh 4.652 dengan satu kursi.

Tabel 8. Komposisi anggota hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Gorontalo pada 1982-1987

Komposisi Anggota	BPS Sulawesi Utara	DPRD Kabupaten Gorontalo	Almanak Golkar
PPP	2	2	2
Golkar	29	29	29
PDI	1	1	1
ABRI	6	6	
Non ABRI	2	2	
Jumlah	40	40	

Di DPRD Kodya Gorontalo, pada Pemilu ini jumlah kursi PPP anjlok. Sebanyak 16 kursi diperebutkan dengan BPP 3.296. PPP hanya memperoleh 8.762 suara dengan tiga kursi. Golkar memperoleh 43.397 suara dengan 13 kursi. PDI memperoleh 593 suara tanpa kursi. BPP pada Pemilu ini 3.296

suara. Jumlah penduduk Kodya Gorontalo 97.511, pemilih 54.345.

Tabel 9. Komposisi anggota hasil Pemilihan Umum di Kodya Gorontalo pada 1982-1987

Komposisi Anggota	BPS Sulawesi Utara	Almanak Golkar
PPP	3	3
Golkar	13	13
PDI	-	-
ABRI	3	
Non ABRI	1	
Jumlah	20	

PEMILU 1987

Golkar memperoleh 299 kursi di DPRRI pada Pemilu 1987, sedangkan PPP merosot dengan hanya memperoleh 61 kursi. Pemilu yang dilaksanakan pada 23 April 1987 itu, lambang Ka'bah di PPP telah diganti dengan Bintang. Berbeda dengan PPP, PDI memperoleh 40 kursi

Jumlah penduduk Sulawesi Utara 2.302.784, pemilih 1.348.093. Untuk kursi DPR RI, PPP hanya memperoleh 71.064 suara. Di Kabupaten Gorontalo jumlah suara PPP 19.464 dan di Kodya Gorontalo 9.296. Golkar memperoleh total jumlah suara 1.146.651. Jumlah suara Golkar di Kabupaten Gorontalo 263.097 dan di Kodya Gorontalo 50.127. PDI memperoleh 93.162 suara. Di Kabupaten Gorontalo 17.379 dan di Kodya Gorontalo 3.291 suara.

Pemilihan anggota DPRD tingkat I Sulawesi Utara, PPP memperoleh 70.911 suara. Jumlah suara PPP dari Kabupaten Gorontalo 19.218 dan di Kodya Gorontalo 9.428.

Golkar memperoleh 1.150.905 suara, dari Kabupaten Gorontalo 264.734 dan Kodya Gorontalo 50.221. PDI

memperoleh 93.150 suara, dari Kabupaten Gorontalo 17.122 dan Kodya Gorontalo 3.307.

Hasil perhitungan suara untuk DPRD Tingkat II Kabupaten Gorontalo, PPP memperoleh 18.831 suara. Golkar 264.536 suara dan PDI 16.854 suara. Di Kodya Gorontalo, PPP memperoleh 8.982 suara, Golkar 50.131 suara dan PDI mendapat 3.203 suara.

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo 570.159, pemilih 306.781. Di Kodya Gorontalo, jumlah penduduk 109.441, pemilih 66.287.

Tabel 10. Komposisi anggota DPRD dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 1987-1992 di Kabupaten Gorontalo

Komposisi Anggota	DPRD Kabupaten Gorontalo	BPS Sulawesi Utara / Hasil Penghitungan Suara	BPS Kabupaten Gorontalo
PPP	2	18.831	2
Golkar	32	264.536	32
PDI	2	16.854	2
ABRI	9		9
Jumlah	45		45

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo hasil Pemilihan Umum 1987-1992 Ardy Arsyad (Golkar), wakil ketua M Sangid (Golkar), wakil ketua Wijoto Sardjo (ABRI).

Tabel 11. Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 1987-1992 di Kodya Gorontalo

PPP	8.982
Golkar	50.131
PDI	3.203

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Utara

PEMILU 1992

Pada Pemilu 1992, PPP hanya memperoleh 62 kursi di DPR RI. Golkar memperoleh 282 kursi dan PDI 56 kursi. Jumlah kursi PDI bertambah dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Jumlah penduduk Sulawesi Utara pada 1992 sebanyak 2.453.700, pemilih 1.543.800. Di Kabupaten Gorontalo jumlah penduduk 602.000, pemilih 351.600 dan di Kotamadya Gorontalo 117.500, pemilih 74.200.

Jumlah suara untuk pemilihan anggota DPR RI, PPP mendapat 65.169 suara, Golkar memperoleh 1.308.576 dan PDI 104.555. Jumlah suara PPP dari Kabupaten Gorontalo hanya 12.540, Golkar 319.375 dan PDI 10.771 suara. Kotamadya Gorontalo, PPP 8.173, Golkar 58.655 dan PDI 3.138 suara.

Komposisi anggota DPRD Tingkat I Sulawesi Utara pada 1992, PPP mendapat dua kursi, Golkar 32 kursi, PDI dua kursi dan ABRI 9 kursi. Total jumlah kursi 45.

Di DPRD Tingkat II Kabupaten Gorontalo, PPP satu kursi, Golkar 34 kursi, PDI satu kursi dan ABRI 9 kursi. Total 45 kursi. Di Kotamadya Gorontalo jumlah total kursi 20. PPP memperoleh dua kursi, Golkar 13 kursi, PDI mendapat satu kursi, dan pengangkatan untuk ABRI disediakan empat kursi.

Tabel 12. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 1992-1997

Komposisi Anggota	BPS Sulawesi Utara	DPRD Kabupaten Gorontalo
PPP	1	1
Golkar	34	34
PDI	1	1
ABRI	9	9
Jumlah	45	45

Ketua DPRD periode 1992-1997 di Kabupaten Gorontalo Amir Piola Isa (Golkar), wakil ketua Wijoto Sardjo (ABRI), wakil ketua Ardy Arsyad (Golkar).

Tabel 13. Komposisi anggota DPRD Kotamadya Gorontalo 1992-1997

PPP	2
Golkar	13
PDI	1
ABRI	4
Jumlah	20

Sumber: Kantor Statistik Sulawesi Utara 1995

PEMILU 1997

Pemilu kali ini dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Golkar meraih 325 kursi, meningkat dari Pemilu sebelumnya. Demikian halnya dengan PPP yang memperoleh 89 kursi. PDI yang mengalami masalah internal hanya mendapat 11 kursi di DPR RI. PDI pecah. Ada kubu Soerjadi dan Megawati Sorkanoputri. Akibat perpecahan ini lahir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Seperti halnya komposisi jumlah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada periode sebelumnya, Golkar meraih 34 kursi, PPP satu kursi, PDI satu kursi dan ABRI 9 kursi. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Jusuf N Jantu (Golkar), wakil ketua Dodi Suakasio (ABRI), wakil ketua Jasin BI Cono (Golkar), wakil ketua Walidun Husain (Golkar).

MPR kembali menetapkan Soeharto sebagai Presiden dan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Wakil Presiden.

PEMILU 1999

Soeharto lengser sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 dan digantikan Bacharuddin Jusuf Habibie. Pemilu yang sedianya berlangsung setiap lima tahun, dipercepat, yakni pada 7 Juni 1999. Di era reformasi ini, banyak muncul partai baru. Jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM sebanyak 141 partai. Yang lolos verifikasi dan sebagai peserta Pemilu 48 partai.

Pelaksanaan pemungutan suara pada 7 Juni berjalan dengan lancar. Namun, pada tahap penghitungan suara dan pembagian muncul tentangan dan penolakan dari 27 partai politik peserta Pemilu. Ke 27 partai politik tersebut menolak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum kemudian menyerahkan dokumen rapat tersebut kepada Presiden BJ Habibie. Presiden, selanjutnya, menyerahkan dokumen tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu untuk diteliti. Setelah melakukan penelitian Panitia Pengawas Pemilu merekomendasikan bahwa Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni sah. Sebagian besar keberatan yang disampaikan tidak menyertakan bukti atau data tertulis. Presiden menyatakan bahwa hasil pemilu sah.

Pemenang pada Pemilu 1999 ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh 153 kursi. Golkar memperoleh 120 kursi, PPP 58 kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 51 kursi. Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 34 kursi, Partai Bulan Bintang 13 kursi, dan Partai Keadilan 7 kursi. Partai lainnya memperoleh satu sampai tiga kursi.

Pada periode 2009-2004, terdapat lima fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo. Fraksi Partai Golkar dengan 25 anggota, Fraksi Persatuan Pembangunan dengan tujuh anggota (gabungan dari PPP dan PBB), Fraksi Reformasi

(gabungan PDI, PAN, PKB dan PSII) dengan 4 anggota. Fraksi Perjuangan Rakyat (gabungan PDI Perjuangan dan PDR) dengan 4 anggota dan Fraksi TNI/Polri dengan lima anggota. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Husin Bilondatu (Golkar), wakil ketua Farid I Jantu kemudian diganti Wahyudin Husain (Fraksi Persatuan Pembangunan) dan wakil ketua Mohamad Kris Wartabone (Fraksi Perjuangan Rakyat).

PEMILU 2004

Mulai Pemilu 2004, rakyat memilih langsung sebanyak 550 anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, serta 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu 2004, berlangsung serentak pada 5 April. Sistem Pemilu 2004 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Anggota DPR dan DPRD di provinsi dan kabupaten/kota dipilih dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka.

Perolehan kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Anggota DPD dipilih dengan menggunakan sistem distrik (provinsi) berwakil banyak. Setiap distrik (provinsi) diwakili empat anggota DPD.

Sebanyak 24 partai politik ikut dalam Pemilu ini. Gorontalo telah menjadi provinsi sendiri, dengan hasil perolehan penghitungan suara untuk DPR RI.

Tabel 14. Tabel Partai Politik Peserta Pemilu 2004.

No	Nama Partai	Jumlah
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.303
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	779
3	Partai Bulan Bintang	25.815
4	Partai Merdeka	1.070
5	Partai Persatuan Pembangunan	62.384
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4.673
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1.055
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	52
9	Partai Demokrat	4.279
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	581
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	6.969
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	445
13	Partai Amanat Nasional	20.979
14	Partai Karya Peduli Bangsa	4.979
15	Partai Kebangkitan Bangsa	16.548
16	Partai Keadilan Sejahtera	16.184
17	Partai Bintang Reformasi	15.806
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29.204
19	Partai Damai Sejahtera	3.439
20	Partai Golongan Karya	254.525
21	Partai Patriot Pancasila	5.775
22	Partai Serikat Indonesia	1.435
23	Partai Persatuan Daerah	1.337
24	Partai Pelopor	32
Jumlah		479.648

Tabel 15. Hasil penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Gorontalo.

No	Nama Partai	Jumlah
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.279
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	797
3	Partai Bulan Bintang	26.007
4	Partai Merdeka	1.241

5	Partai Persatuan Pembangunan	59.204
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4.911
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	846
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.131
9	Partai Demokrat	3.456
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	7.128
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	856
13	Partai Amanat Nasional	21.423
14	Partai Karya Peduli Bangsa	4.217
15	Partai Kebangkitan Bangsa	14.189
16	Partai Keadilan Sejahtera	15.718
17	Partai Bintang Reformasi	16.475
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29.428
19	Partai Damai Sejahtera	2.961
20	Partai Golongan Karya	243.701
21	Partai Patriot Pancasila	2.932
22	Partai Serikat Indonesia	1.546
23	Partai Persatuan Daerah	1.942
24	Partai Pelopor	2.511
Jumlah		463.899

PEMILU 2009

Pada Pemilu 2009 yang dilaksanakan serentak pada 9 April, untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang diperoleh setiap partai politik.

Sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Terdapat 44 partai politik peserta pemilu (termasuk enam dari partai lokal di Aceh). Anggota DPD

dipilih dengan sistem distrik berwakil banyak dan di setiap provinsi ada empat perwakilan.

Pemilu 2009, telah terjadi pemekaran kecamatan dan desa. Selain itu, Gorontalo Utara sudah menjadi kabupaten sendiri. Dengan demikian, terdapat lima kabupaten dan satu kotamadya di Provinsi Gorontalo, masing-masing: Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, serta Kotamadya Gorontalo. Terdapat 65 kecamatan dengan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 325. Jumlah desa/kelurahan 562 dengan jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 1686 orang dan jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 15.603 orang.

Data Penduduk Potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo, pada 5 April 2008, dengan jumlah 1.006.837. Laki-laki 505.561 dan perempuan 501.276. Berdasarkan pasal 23 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa sampai tiga juta jiwa memperoleh alokasi kursi sebanyak 45. Provinsi yang jumlah penduduk sampai satu juta jiwa memperoleh alokasi 35 kursi.

Jumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo bertambah dari 35 menjadi 45 kursi. Adapun jumlah kursi di Kabupaten Gorontalo 40, di Kabupaten Pohuwato 25, Boalemo 25, Gorontalo Utara 25, Bone Bolango 25 dan Kotamadya Gorontalo 25.

Anggota DPR RI hasil Pemilu 2009, Roem Kono (Golkar), AW Thalib (PPP) dan Kasma Bouty (Demokrat). Adapun anggota Dewan Perwakilan Daerah hasil Pemilu 2009, masing-masing: Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmijati Yahya, Elnino M. Husein Mohi, Budi Doku.

Tabel 16. Partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Gorontalo

Partai politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah kursi
Partai Hati Nurani Rakyat	3	2	5
Partai Peduli Rakyat Nasional	-	1	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1	-	1
Partai Keadilan Sejahtera	3	-	3
Partai Amanat Nasional	3	2	5
Partai Demokrasi Kebangsaan	1	-	1
Partai Golongan Karya	9	4	13
Partai Persatuan Pembangunan	5	-	5
Partai Bulan Bintang	3	-	3
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	-	3
Partai Demokrat	4	-	4
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1	-	1
Jumlah	36	9	45

PEMILU 2014

Pada Pemilu 2014, dua pasangan suami istri melenggang sebagai anggota Dewan. Pasangan suami istri dari Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kota Gorontalo, serta Fadel Muhammad dan Hanna Hasanah Fadel Muhammad. Fadel yang pernah menjadi Gubernur Gorontalo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Hanna untuk kedua kalinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selain Fadel, di DPR, Roem Kono dari partai Golkar juga

mendapatkan satu kursi dari tiga kursi di Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo. Satu kursi lagi terpilih Elnino M Husein Mohi dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Bersama Hanna di DPD, Rahmijati Jahya, Abdurahman Abubakar Bachmid dan Dewi Sartika Hemeto. Komposisi perempuan yang terpilih sebagai anggota DPD pada Pemilu ini 75 persen.

Tabel 17. Komposisi anggota DPRD Provinsi

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Totok Bachtiar, SE	GOLKAR	Gorontalo 1
2.	Lisna Alamri	GOLKAR	Gorontalo 1
3.	Hj. Yeyen Saptiani Sidiki, SE	GOLKAR	Gorontalo 2
4.	DR. Rustam HS. Akili, SE, MH	GOLKAR	Gorontalo 3
5.	DR. Drs. Paris R.A. Jusuf, S.SosI, M.Si	GOLKAR	Gorontalo 3
6.	Ir. Wasito Somawiyono	GOLKAR	Gorontalo 2
7.	Drs. H. Sun Biki, M.Ec. Dev	GOLKAR	Gorontalo 4
8.	Hamzah Sidik, SH	GOLKAR	Gorontalo 5
9.	Drs. Darwin Pagau, MM.PUB	GOLKAR	Gorontalo 6
10.	Hj. Suharsi Igirisa, S.IP	GOLKAR	Gorontalo 6
11.	H. Ulul Azmi Kadji, SE	GOLKAR	Gorontalo 6
12.	Dra. Hj. Nikma Tahir	GOLKAR	Gorontalo 6
13.	H. Feriyanto Mayulu, S.I.Kom, MH	PAN	Gorontalo 1
14.	Hj. Lolly Yunus	PAN	Gorontalo 2
15.	Daryatno Gobel, S.IP	PAN	Gorontalo 3
16.	Drs. Jusuf S. Hida	PAN	Gorontalo 3
17.	Hj. Conny Gobel	PAN	Gorontalo 4

18.	Hendra Nurdin, S.HI	PAN	Gorontalo 5
19.	H. Ismail Alulu	PAN	Gorontalo 6
20.	Alifuddin Djamal, SE	PDIP	Gorontalo 1
21.	H. Moh. Kris Wartabone S.AP	PDIP	Gorontalo 2
22.	Espin Tuli, SE	PDIP	Gorontalo 3
23.	Venny Rosdiana Anwar, SE, MH	PDIP	Gorontalo 4
24.	Dra. Hj. Sriani Hadju	PDIP	Gorontalo 5
25.	Ir. La Ode Haimudin	PDIP	Gorontalo 6
26.	H. Helmi Adam Nento, S.Pd, M.Ec.Dev	PKS	Gorontalo 1
27.	Irwan Mamesah	PKS	Gorontalo 2
28.	H. Jasim U. Dilo, A.Md	PKS	Gorontalo 3
29.	Manaf Abidin Hamzah	PKS	Gorontalo 4
30.	Ilham Kuntono	PKS	Gorontalo 6
31.	Haspida Tadjudin, SE	HANURA	Gorontalo 1
32.	Nurjannah, SH, ST	HANURA	Gorontalo 2
33.	Ir. H. Hamid Kuna, MM	HANURA	Gorontalo 3
34.	Kaspian Kadir	HANURA	Gorontalo 5
35.	Firman Ferdinand Soenge	HANURA	Gorontalo 6
36.	Drs. Mansur Jusuf Detuage, MM	DEMOKRAT	Gorontalo 1
37..	H. Arifin Djakani, SE, S.Ag, MM	DEMOKRAT	Gorontalo 3
38.	Chamdi Ali Tumenggung Mayang	DEMOKRAT	Gorontalo 4
39.	M. Hidayat H. Bouty, SE	DEMOKRAT	Gorontalo 6
40.	DR. H. AW. Talib, M.Si	PPP	Gorontalo 1
41.	Dr. Rusliyanto Monoarfa	PPP	Gorontalo 2
42.	Ir. H. Awaludin Pauweni	PPP	Gorontalo 3
43.	Alfian Pomalingo	PPP	Gorontalo 5

44.	Ansar Akuba, S.Pd.I	GERINDRA	Gorontalo 6
45.	Hj. Sintje Kadji	PKB	Gorontalo 1

Tabel 18. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang terpilih sebagai berikut:

JUMLAH CALON TERPILIH SESUAI JENIS KELAMIN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014 PROVINSI GORONTALO										
NO	JENIS KELAMIN (L/P)	PEROLEHAN KURSI						JUMLAH KURSI		
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6			
1	LAKI - LAKI (L)	6	3	8	4	4	8	4	8	33
2	PEREMPUAN (P)	2	3	1	2	1	3			12
JUMLAH		8	6	9	6	5	11			45
PERSENTASE LAKI - LAKI (%)		75,00	50,00	88,89	66,67	80,00	72,73			73,33
PERSENTASE PEREMPUAN (%)		25,00	50,00	11,11	33,33	20,00	27,27			26,67

Tabel 19. Persentase perolehan kursi partai Politik di DPRD Provinsi Gorontalo.

Partai Politik	Jumlah kursi	%
PKB	1	2,22%
PKS	5	11,11%
PDIP	6	13,33%
GOLKAR	12	26,67 %
GERINDRA	1	2,22%
DEMOKRAT	4	8,89%
PAN	7	15,56%
PPP	4	8,89%
HANURA	5	11,11%
Total	45	

Tabel 20. Persentase perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Boalemo.

Partai	Jumlah Kursi
PKS	1
PDIP	4
GOLKAR	8
GERINDRA	3
DEMOKRAT	4
PPP	3
HANURA	2
Total	25

Tabel 21. Persentase perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten.Bone Bolango.

Partai	Jumlah Kursi
PKS	2
PDIP	3
GOLKAR	4
GERINDRA	2
DEMOKRAT	3
PAN	3
PPP	4
HANURA	1
PBB	1
PKPI	2
Total	25

Tabel 22. Persentase perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Gorontalo.

Partai	Jumlah Kursi
NasDem	1
PKB	1
PKS	4
PDIP	6
GOLKAR	5
DEMOKRAT	3
PAN	5
PPP	4
HANURA	5
PBB	1
Total	35

Tabel 23. Persentase perolehan kursi partai politik di DPRD
Kabupaten Gorontalo Utara.

Partai	Jumlah Kursi
PKS	2
PDIP	3
GOLKAR	5
GERINDRA	2
DEMOKRAT	2
PAN	5
PPP	3
HANURA	3
Total	25

Tabel 24. Persentase perolehan kursi partai politik di DPRD
Kabupaten Pohuwato.

Partai	Jumlah Kursi
PKB	2
PKS	1
PDIP	3
GOLKAR	9
GERINDRA	4
DEMOKRAT	1
PAN	1
PPP	1
HANURA	2
PBB	1
Total	25

Tabel 25. Persentase perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Gorontalo.

Partai	Jumlah Kursi
PDIP	3
GOLKAR	4
GERINDRA	2
DEMOKRAT	4
PAN	4
PPP	3
HANURA	3
PBB	2
Total	25

PEMILU PRESIDEN

Pada 2004, dilaksanakan pemilihan presiden wakil presiden secara langsung. Pemilu presiden dan wakil presiden ini dalam dua putaran. Putaran pertama terdapat lima pasangan. Karena belum ada yang memperoleh 50% jumlah suara, dilakukan putaran kedua yang diikuti dua pasangan. Presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2004 ini pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs H. Muhammad Jusuf Kalla.

Tabel 26. Hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama di Provinsi Gorontalo, pada 5 Juli 2004.

No	Pasangan	Jumlah
1	H. Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid	402.162
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi	39.647

3	Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	39.569
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	31.210
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	12.624
Jumlah		525.212

Tabel 27. Hasil perolehan suara putaran kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Gorontalo, pada 20 September 2004.

No	Pasangan	Jumlah
1	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi	200.230
2	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	276.402
Jumlah		476.632

Pada Pemilu 2009, pasangan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono terpilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2009, diikuti tiga pasangan calon, hanya dengan satu putaran saja. Pasangan calon, yaitu :

- a) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNU)
- b) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI)
- c) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP (didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura).

Tabel 28. Hasil perolehan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Gorontalo 2009.

No	Pasangan	Jumlah
1	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP	269.057
2	Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono	241.222
3	Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto	35.225
Jumlah		545.504

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa mendapatkan jumlah suara sebesar 62.576.444 atau 46,85 persen. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla mendapatkan jumlah suara sebesar 70.997.833 atau 53,15 persen.

Tabel 29. Hasil perolehan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Gorontalo tahun 2014.

No	Pasangan	Jumlah
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa	378.735 (63,10%)
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla	221.497 (36,90%)
Jumlah		600.232

Di Gorontalo, jumlah suara H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa sebesar 378.735 atau 63,10 persen, sedangkan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla 221.497 atau 36,90 persen. Dari tiga kali Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden secara langsung, Gorontalo tidak seperti pemilih kebanyakan. Pemenang hasil penghitungan suara di Gorontalo tidak menunjukkan realitas secara nasional.

PEMILIHAN GUBERNUR GORONTALO

Seperti halnya pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan secara langsung. Pada 2006, pasangan Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail kembali terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

Setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, pada 2009, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Wakil Gubernur Gusnar Ismail kemudian diangkat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo. Untuk mengisi kekosongan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi Gorontalo melakukan pemilihan. Terpilih sebagai Wakil Gubernur Tonny Uloli.

Pada 16 November 2011, dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 16 Januari 2012, dalam sidang paripurna istimewa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Marthen Taha. Pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim, resmi memimpin Provinsi Gorontalo periode 2012-2017.

PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA

Semangat otonomi daerah sejak 1999 telah melahirkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Pasangan kepala daerah diajukan partai politik dan gabungan partai politik.

Pada 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Pohuwato. Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo pasangan David Bobihoe Akib dan Sofyan Puhi. Di Bone Bolango, terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati pasangan Ismet Mile dan Moh. Kilat Wartabone. Di Pohuwato Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasangan Zainudin Hasan dan Yusuf Giasi.

Pada 2006, pasangan terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Iwan Bokings dan La Ode Haimuddin. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo berlangsung pada 12 Mei 2008. Pasangan terpilih Adhan Dambea dan Feriyanto Mayulu. Kabupaten Gorontalo Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2007 melaksanakan pemilihan pada 2008. Pasangan Rusli Habibie dan Indra Yasin terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Pemilihan Kepala Daerah kembali dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Pohuwato pada 2010. Pasangan David Bobihoe Akib dan Tonny Yunus terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pada 30 Agustus 2010. Di Kabupaten Pohuwato,

pasangan Syarif Mbuinga dan Amin Haras terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pada 22 September 2010.

Di Kabupaten Bone Bolango, pada Pemilu 2010, calon perseorangan pasangan Haris Nadjamuddin dan Hamim Pou terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Calon perseorangan dimungkinkan setelah diberlakukan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pasangan terpilih dilaksanakan pada 18 September 2010.

Di Kabupaten Boalemo, pada 16 November 2011, dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati setempat. Pelaksanaan ini bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Pada 1 Februari 2012, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik Rum Pagau dan Lahmudin Hambali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boalemo periode 2012-2017, di gedung DPRD Boalemo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adra'1, Kadjat (2003), Biografi Taki Niode. Dalam biografi ini terdapat lampiran hasil penelitian tim peneliti IKIP negeri Manado Cabang Gorontalo, selama satu tahun mulai 23 Januari 1980-23 Januari 1981. Tim peneliti ini terdiri dari: Th A. Musa (ketua), Ny MM Kasim (wakil) dan anggota Mh Sarita, Ibrahim Polontalo, B.J. Mahdang, Nurdin Dama, Nani Tuloli, FM Dunga dan Z. Tuli.
- Almanak Nasional Golongan Karya 1983-1988. Diterbitkan Golongan Karya
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1976), Inventaris Arsip Gorontalo 1810-1865. Arsip Nasional Jakarta.
- (1989), Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960. Diterbitkan Arsip Nasional RI, perwakilan di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
- (2005), Citra Sulawesi Utara dalam Arsip. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Desember 2005.
- (2009), Citra Gorontalo dalam Arsip. Penerbitan Naskah Sumber Arsip, Seri Citra Daerah Nomor 14.
- BPS (1981), Sulawesi Utara dalam Angka 1981. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- (1982), Sulawesi Utara dalam Angka 1982. BPS Provinsi Sulawesi Utara.

- (1986), Sulawesi Utara dalam Angka 1986. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- (1995), Sulawesi Utara dalam Angka 1995. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- (2002), Kota Gorontalo dalam Angka Tahun 2002. BPS Kota Gorontalo.
- (2010), Gorontalo dalam Angka Tahun 2010. BPS Provinsi Gorontalo.
- (2011), Gorontalo dalam Angka Tahun 2011. BPS Provinsi Gorontalo.
- DPRD Kabupaten Gorontalo (1992), DPRD Periode 1987-1992 dalam Memori.
- (1997), DPRD Periode 1992-1997 dalam Memori.
- (1999), DPRD Periode 1997-1999 dalam Memori.
- (2004), Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Periode 1999-2004 dalam Memori.
- (2009), Memori DPRD Kabupaten Gorontalo Periode 2004-2009.
- Harvey, Barbara Sillars (1989), PERMESTA Pemberontakan Setengah Hati. Penerbit Grafiti Pers. Cetakan kedua.
- Hatta, Mohammad (2008), Demokrasi Kita. Penerbit SEGAARSY
- KPU (2010), Pemilu Untuk Pemula (Modul 1)., (2010) Diterbitkan Komisi Pemilihan Umum.
- KPU (2010), Siap Menjadi Pemilih (Modul 2)., (2010) Diterbitkan Komisi Pemilihan Umum.
- KPU (2010), Memilih dengan Cerdas & Cermat (Modul 3)., (2010) Diterbitkan Komisi Pemilihan Umum.
- Pelras, Christian (2006), Manusia Bugis. Diterjemahkan Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady Sirimorok. Diterbitkan Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO.

BIODATA



VERRIANTO Madjowa, lahir di Gorontalo 14 Oktober 1970. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (2008 hingga sekarang). Lulusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Staf Redaksi Majalah Inovasi Unsrat (1990), Wartawan Manado Post (1991-1993), Harian Wibawa Manado (1993), menulis di Harian Cahaya Siang Manado, Harian Fajar Makassar, Harian Republika, majalah Prospek dan Pancaroba Jakarta. Koresponden Majalah D&R Jakarta (1997-1998) dan sejak 1998-2009 Koresponden Tempo. Pemimpin Redaksi Koran Gorontalo (2005), menulis di Jurnal Perempuan (2006), National Geographic Traveler (2010), dan Jurnal Dewan Pers (2011).

Selain sebagai jurnalis, pernah aktif di beberapa organisasi non pemerintah, antara lain, volunteer di LBH Manado-YLBHI (1990-1991), Forum Daerah Walhi Sulawesi Utara (1992-1993), Ketua Kelompok Studi Pengembangan Masyarakat Pesisir, Sempadan (1993-1995), Pendiri dan pengurus Yayasan

Kelola (1995-1997) dan Ketua Badan Pengurus Forum Petaupan Katouan Sulawesi Utara (1998-1999). Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak 1998 dan inisiator berdirinya AJI di Manado dan Gorontalo, Pengawas di Jaring Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA) Gorontalo, serta hobi fotografi.

Pernah bekerja sebagai staf Proyek Natural Resources Management (NRM) kerjasama Bappenas-Departemen Kehutanan dan USAID (United States Agency for International Development (1993-1996) di Taman Nasional Bunaken. Tahun 2004 peneliti di Women Research Institute (WRI) Jakarta tentang Dampak Otonomi Daerah Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Manado. Tahun 2006 melakukan studi evaluasi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, kerjasama Yappika Jakarta dan Publika Manado untuk wilayah Kabupaten Minahasa. Tahun 2006 sebagai konsultan studi peninjauan jaringan komunikasi pengelolaan sumberdaya alam Sulawesi di Yayasan Lestari Manado. Konsultan media di Program Teluk Tomini (2008-2011).

Buku yang sudah diterbitkan *Kemelut Tambang Emas Minahasa, Rekonstruksi Kasus 1986-2001*, diterbitkan YLBHI, 2002, *Kumpulan Puisi*, 2004. Menyusun buku Bunaken (<http://verrianto-madjowa.blogspot.com>), *Gemuruh Magma Gemuruh Ombak di Bibir Pasifik dan Kisah Orang Gorontalo*.